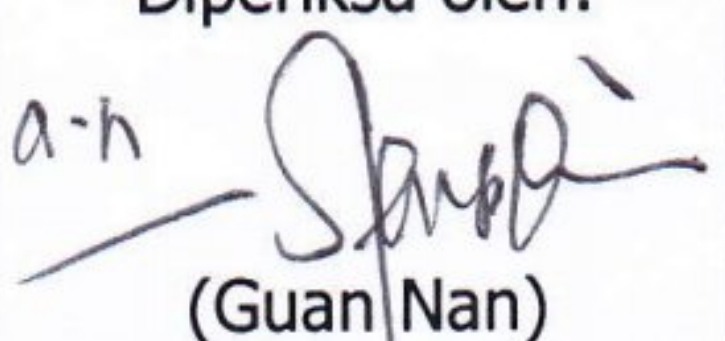




NASKAH UJIAN



☐ UTS ☒ UAS ☐ Susulan UTS/ UAS ☐ Lain-lain : [Ganjil/ Genap] 2020 / 2021

KMK - Mata Kuliah	: UMA04 – Pancasila & Kewarganegaraan	NIM	:
Kelas	: Pagi	Nama Mahasiswa	:
Hari /Tanggal	: Jumat / 18 – 06 - 2021		
Waktu Ujian	: 09:00 – 10:40		
Sifat Ujian	: Buka/ Tutup Buku/ Kamus/ Take Home	Diperiksa oleh:	Tanda Tangan :
Lembar Jawaban	: Ya / Tidak	a-h 	
Laptop	: Ya/ Tidak	(Guan Nan)	
Kalkulator	: Ya/ Tidak	Tanggal : 07-05-2021	

Naskah ujian harap dimasukkan ke dalam lembar jawaban dan dikumpulkan kembali !!!

Bacalah Kasus sebelum Mengerjakan Soal! Semua soal Berbobot 20%. Jawaban Anda ditulis tangan dan diunggah kembali pada portal mahasiswa dalam bentuk PDF. Apabila ada pertanyaan menyangkut soal ujian, Anda dapat mengirim email ke: mku.uas@ubm.ac.id. Terima kasih!

Pemerintah Cairkan Rp 30,8 Triliun untuk THR ASN, TNI dan Polri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan menggelontorkan Rp 30,8 triliun untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan. THR yang diterima akan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima setiap bulannya. “Kebijakan pemberian THR yang ditampung APBN 2021 penyalurannya akan dilakukan mulai periode H-10 sampai H-5 sebelum Idul Fitri,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 29/4/2021. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 terkait pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.


“Oleh karena itu pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 yaitu dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat. Alokasi anggaran THR 2021 itu mencerminkan pemihakan pemerintah bagi penanganan Covid dan untuk mendorong pemulihan ekonomi.” Gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri akan disalurkan pada Juni 2021, meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, “Sehingga harapannya ASN, TNI, Polri bisa fokus melakukan tugas-tugasnya secara penuh dedikasi, terus memberikan empati dan simpatinya karena saat ini Covid masih berlangsung.”

Dengan demikian Menkeu berharap adanya dorongan THR dan program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) 2021, ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7% pada kuartal II-2021. “Kebijakan pemerintah dalam memberikan THR jadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah dan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sumber: Triyan Pangastuti, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/767441/pemerintah-cairkan-rp-308-triliun-untuk-thr-asn-tni-dan-polri>, diunduh dengan perubahan, Kamis, 29 April 2021.

Pertanyaan:

1. "Sebanyak 76% pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali," ungkap Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para kepala daerah, Kamis 15 April 2021. Pajak digunakan sebagai biaya operasional negara, termasuk pemberian THR dan Gaji ke 13 untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Jelaskan:
 - a). Dua dimensi campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak!

KMK - Mata Kuliah : UMA04 – Pancasila & Kewarganegaraan	Diperiksa oleh: 
Kelas : Pagi	
Hari /Tanggal : Jumat / 18 – 06 - 2021	

- b). Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan dan apa fungsi masing-masing pihak?
2. Pemberian THR dan Gaji ke-13 bertujuan supaya, “ASN, TNI, Polri bisa fokus melakukan tugas-tugasnya secara penuh dedikasi, terus memberikan empati dan simpatinya karena saat ini Covid masih berlangsung.” Jelaskan:
- Konsep hubungan kewajiban membayar pajak dan bela Negara!
 - Konsep bela negara non fisik dan secara fisik!
3. “Alokasi anggaran THR 2021 itu mencerminkan pemihakan pemerintah bagi penanganan Covid dan untuk mendorong pemulihan ekonomi.” Pernyataan tersebut secara tersirat menunjuk keberpihakan pemerintah kepada kondisi nyata rakyatnya. Dan hal ini sebenarnya sudah dihidupi oleh bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Jelaskan dengan menggunakan contoh (tiga contoh) bagaimana konsep “demokrasi desa” yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh masyarakat Indonesia itu!
4. Pemerintah menggelontorkan Rp 30,8 triliun untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan. Tentu saja biaya ini sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Jelaskan fungsi dan hak DPR berikut ini:
- Fungsi Anggaran!
 - Hak menyatakan pendapat!
- Jawaban Anda harus mengacu pada pengandaian bahwa masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban tentang penggunaan Rp 30,8 triliun tersebut!
5. Apabila Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 terkait pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan gagal dilaksanakan, maka keseimbangan dan keutuhan pengelolaan negara akan terganggu. Sebutkan dan jelaskan enam hal yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa!

Selamat Mengerjakan!

1. a. pertama : bersifat memaksa dimana secara hukum pajak wajib dibayar, jadi ketika seorang warga negara dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka warga tersebut dapat dikenakan sanksi yang dapat berupa denda, sanksi administratif, atau hukuman secara pidana dan membayar pajak merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.
- kedua : bersifat kerelaan dimana itu merupakan sebagai bentuk implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara
- b. pertama : Negara, memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan negara dan mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
- kedua : Warga negara / perorangan dimana kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan dimana penghasilan yang kita dapatkan disisihkan sebagai bentuk partisipasi secara finansial untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan
- ketiga : Badan / lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha yang mendukung bergeraknya roda ekonomi di dalam suatu negara.
2. a. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk kepentingan negara. Uang dari hasil pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan negara, dan lainnya. Tanpa ada pembayaran pajak, negara secara ekonomi dan politik akan lemah. Maka dari, peran kita sebagai warga negara yang baik dan patuh membayar pajak merupakan bentuk bela negara, rasa cinta tanah air, dan rela berkorban dari masyarakat secara non fisik.
- b. o Non fisik : meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, sadar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara
- o Fisik : usaha mempertahankan negara melalui perjuangan fisik yang dilakukan oleh TNI & Polri (kekuatan utama) dan rakyat (kekuatan cadangan)

3. • Cita-cita rapat → sudah melekat di dalam sanubari masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut banyak orang contoh di daerah Jawa, Bugis dan lainnya dimana sistem pemerintahan desa dikenal dengan sistem pengadilan kolektif

• Cita-cita massa protes : hak rakyat untuk membantah dengan cara umum (terbuka) segala peraturan negeri yang dianggap tidak adil. Hak menyelenggarakan protes sudah hidup di tengah masyarakat sejak lama contoh di jaman Majapahit ada tradisi pepe (berjemur ramai-ramai) untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa.

• Cita-cita tolong-menolong : Masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong menolong dan gotong royong. Dapat ditemui banyak warga negara yang saling tolong menolong / bekerja sama dalam melakukan kegiatan.

4. a. Fungsi anggaran : Fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dimana masyarakat bisa mengajukan petisi kepada pemerintah untuk kejelasan anggaran yang digunakan

b. Hak untuk menyatakan pendapat : Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia Internasional, dimana warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 5 • kegagalan pemimpin : tidak memiliki sensitifitas pada persoalan pokok yang dihadapi pemimpin dimana keutuhan wilayah suatu negara ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat dalam memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Maka dari itu diperlukan pemimpin yang kuat dan tegas.
- krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama : krisis ekonomi yang paling banyak ditemui diikuti oleh krisis lainnya seperti krisis politik, pemerintah, hukum, sosial, moral, dan kepercayaan dimana penyebabnya yaitu utang negara yang berlebihan, laju inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, tingginya tingkat pengangguran, dan meningkatkan kriminalitas di masyarakat
 - krisis politik : apabila ada oknum yang mempermainkan politik untuk kepentingan sendiri maka akan terjadi banyak demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat
 - krisis sosial : memuncaknya konflik sosial berbasis suku, ras, dan agama, dan antar golongan (SARA)
 - Demoralisasi pejabat negara : rakyat yang tidak percaya pada peran aparaturnegara. Rakyat/ masyarakat lebih memilih tindakan main hakim sendiri / mementingkan diri sendiri atau kelompok daripada memercayakan penyelesaian konflik sosial kepada aparat negara
 - Intervensi asing : dimana tujuan utamanya untuk memecah belah dan mengambil keuntungan dari konflik / krisis sosial yang sedang marak - maraknya terjadi dimana adanya protokasi terhadap kelompok yang berkonflik.